

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu pemerintahan, yang pada keselanjutannya dikenal sebagai kedaulatan masyarakat.¹Demokrasi menjadi acuan penting berjalannya pemerintahan desa dalam urusan penentuan kepentingan desa secara mandiri dan bebas. Melalui konsep demokrasi, desa mampu berkembang ke arah yang dibutuhkan, tidak hanya berkatut dikondisi yang sama seterusnya. BPD merupakan sarana perwujudan demokrasi di desa. Dengan begitu BPD juga merupakan lembaga demokratisasi di desa. Siswanto Sunarno menyatakan bahwa arti penting BPD adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan daerah.²

Pembentukan BPD sesungguhnya merupakan proses penciptaan lembaga demokrasi desa. BPD adalah badan yang mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada desa dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan masyarakat.³ BPD secara umum merupakan lembaga demokratisasi yang

¹Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980,Hlm. 204

²Suswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, Hal, 65.

³Endang Sayekti, “Restrukturisasi Badan Perwakilan Dalam Rangka *Check And Balance* Dalam Fungsi Legislasi”,Jurnal Konstitusi, Vol.Iii No.1, Juni 2010, Hal.82

dipandang sebagai representasi masyarakat desa dalam menyaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD memiliki fungsi sebagai wadah untuk kepentingan dan aspirasi masyarakat desa diwakilnya bisa diperjuangkan dan didengar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui BPD hak-hak dasar dan politik masyarakat desa dapat ditegakkan. Atas dasar itulah penting bagi BPD untuk menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Kegiatan menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat penting karena BPD dapat melakukan penggalian potensi permasalahan, potensi sumberdaya yang dimiliki serta menemukan pemecahan dari permasalahan yang dihadapi. Pada kesempatan musyawarah tersebut akan menghasilkan rangkuman potensi permasalahan serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan guna memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi yang kemudian disusun dalam bentuk program kerja padukuhan yang menjadi bahan usulan kegiatan ditingkat desa. Menurut Archon Fung yang dikutip Salman Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang menghasilkan dengan persoalan nyata yang berkembang di

masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.⁴

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo nampaknya dalam penyelenggaraan musyawarah belum berjalan dengan baik. Padahal untuk menjangkau aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum formal dengan masyarakat untuk menggalang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di desa Kuaklalo.

Pengefektifan penjangkauan aspirasi masyarakat yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara langsung dengan semua golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada di desa supaya semua aspirasi dapat ditampung. Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam menjangkau aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan mengunjungi rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa. Dengan demikian kedekatan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik.

Ragam kanal alternatif sesungguhnya memiliki kontribusi besar dalam menghidupkan dan merawat ruang-ruang deliberasi desa. Kanal-kanal alternatif ini dapat berupa forum-forum warga (ritual publik, tradisi), kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat desa (baik kelompok kultural, keagamaan, dan sektoral).⁵ Ditengah

⁴Ramadhan, febrina. Fungsi badan permusyawaratan desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan desa. (skripsi) ilmu pemerintahan sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa " stpmd-apmd" 2019 hal 10

⁵Dina mariana, dkk "situs baru demokrasi lokal" .Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta. 2017. hal. 80

tersendatnya rute representasi formal oleh BPD, kanal informal ini justru mampu menembus kemacetan menuju ruang-ruang deliberasi desa.

Badan permusyawaratan desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi di lingkungan desa, sehingga mengharuskan BPD untuk menyatu dengan masyarakat, harus mampu menjaring dan menyalurkan aspirasi atau keinginan masyarakat.⁶ Artinya, dalam melahirkan kebijakan Badan Permusyawaratan Desa harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya. Pengertian diatas menegaskan bahwa bagaimanapun Badan Permusyawaratan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan suatu kebijakan atau peraturan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan dari masyarakat desa

Kurang optimalnya kemampuan Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat nampak dilihat dari tidak terjaringnya aspirasi masyarakat terkait problem pencurian pakan ternak, keamanan hutan lindung, serta usulan dari masyarakat terkait tempat penampungan air yang menghalangi aliran air dari sumber mata air dan tumpukan

⁶Rede, debby, partisipasi BPD dalam pembentukan peraturan desa. Jurnal lyceum vol 4 no 1 januari 2016. Hal. 18

sampah-sampah yang menyebabkan aliran air tersumbat. Padahal sumber mata air tersebut digunakan untuk keperluan pertanian dan untuk kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Studi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa Kuaklalo dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat mengaplikasikan teori dan memperoleh tambahan pengetahuan serta informasi dari penelitian ini.

2. Secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh konsep teoritik sebagai konsepsi yang fundamental menuju kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan studi pengembangan kapasitas BPD dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kuaklalo

3. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan kepada BPD Kuaklalo bahwa pentingnya proses menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan semoga tulisan ini memberikan kontribusi positif bagi instansi terkait dalam hal ini BPD Kuaklalo yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat.